



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) berusaha untuk melakukan percepatan dalam penataan organisasi, penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia yang disusun kedalam sebuah Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 yang diselaraskan dengan visi misi Gubernur Sumatera Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Sesuai ketentuan dengan mekanisme penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, dan Perubahan RKPD (PRKPD) serta menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan perubahan PPAS untuk penyusunan perubahan APBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk lebih optimal. Berdasarkan peranan tersebut maka penting bagi SetdaprovSU merumuskan rancangan Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD, serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja untuk periode satu tahun sebagai implementasi dan dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- b. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- c. Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah;
- d. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- f. Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2022 dan Capaian

Renstra

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU selama tahun 2023 dan perkiraan target pada tahun 2025.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2024 tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Faktor yang sekiranya dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dikarenakan karena kekurangan Anggaran.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, penting untuk mempertimbangkan implikasi yang mungkin timbul terhadap target capaian

program Renstra Perangkat Daerah. Beberapa implikasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1) Penyesuaian Prioritas Program

Setiap perubahan dalam kebijakan atau prioritas nasional dapat berdampak pada prioritas program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memerlukan penyesuaian target dan strategi pelaksanaan agar tetap selaras dengan arah kebijakan terbaru.

2) Inovasi dan Teknologi

Kemajuan teknologi atau penerapan inovasi baru dalam pelaksanaan program dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sehingga target capaian dapat ditingkatkan. Sebaliknya, ketertinggalan dalam adopsi teknologi dapat menjadi penghambat pencapaian target.

d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1) Prioritisasi Anggaran pada program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian target Renstra, Prioritaskan alokasi dana pada program prioritas.

2) Alokasikan anggaran untuk pengembangan dan penerapan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi program. Dorong inisiatif inovasi dalam pelaksanaan program, termasuk melalui Kerjasama untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif.

TABEL 1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA
SKPD s/d TAHUN 2022 PROVINSI SUMATERA UTARA

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAPROVSU

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan					Indikator Kinerja (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
									Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	72%	100.00%	93%	93.30%	100.00%	265.500%	265.50%
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	300.00%	-
4	01	01	1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	-	-	-
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	100%	100%	#DIV/0!	100%	100%	-
4	01	01	1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	-	-	-	#DIV/0!	0	0,00%	

kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	-	-	-	-	40 orang	-	-
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	60.90%	100%	66.70%	66.70%	100%	227.600%	227.60%
4	01	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	100%	-	-	4 Paket	-	-
4	01	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	100%	100%	100%	100,00%	3 Paket	500%	166.67%
4	01	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100%	100%	100%	100,00%	1 Paket	300%	300,00%
4	01	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100%	-	-	-	1 Laporan	-	-
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300,00%
4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100%	100%	100%	100,00%	1 Laporan	300%	300,00%
4	01	01	1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Biro	-	100%	100%	100%	100,00%	-	-	-

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
4	01	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100%	100%	100%	100,00%	1 Laporan	300%	300,00%
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	300%	300,00%
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100%	100%	100%	100,00%	20 unit	2200%	110,00%
4	01	03				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	99.80%	100%	100,00%	100,00%	100%	299.80%	299.800%
4	01	03	1	01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	99.30%	100%	100%	100,00%	100%	299.30%	299.300%
4	01	03	1	01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	-
4	01	03	1	01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	132 Orang	132 Orang	132 Orang	100,00%	1 Dokumen	265	26500,00%
4	01	03	1	01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	100,00%	1 Dokumen	67	6700,00%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
4	01	03	1	02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
4	01	03	1	02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	300,00%	300,00%
4	01	03	1	02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	300,00%	300,00%
4	01	03	1	02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	300,00%	300,00%
4	01	03	1	03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	300,00%	300,00%
4	01	03	1	03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	300,00%	300,00%
4	01	03	1	03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	300,00%	300,00%
4	01	03	1	03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi dan Monitoring yang tersusun terkait Pelaksanaan Kerjasama	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	300,00%	300,00%

2. Analisa Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU.

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan Penyelesaian batas daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Kerjasama.

Dalam urusan Penyelesaian batas daerah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU. Kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU berupa melaksanakan perundingan, penetapan dan peneguhan tapal batas wilayah Kabupaten/Kota, memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Untuk urusan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, monitoring, pemantauan dan evaluasi data informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi hasil monitoring, pemantauan dan evaluasi data informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan penyusunan petunjuk

pelaksanaan/ teknis pembinaan penyusunan LKPJ, LPPD dan ringkasan LPPD, menyusun statistik data informasi mengenai LKPJ, LPPD dan ringkasan LPPD.

Sedangkan untuk urusan Fasilitasi Kerjama, kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta dalam dan luar negeri, pelaksanaan pengkajian penawaran kerja sama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta dalam dan luar negeri, pelaksanaan pembahasan bersama draf kerja sama dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dan/atau sinergi pelaksanaan perencanaan pembangunan, fasilitasi penandatanganan naskah kerja sama, pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan APBD atau tidak menggunakan APBD (izin alasan penting).

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja Pelayanan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

TABEL 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDAPROVSU TAHUN 2022 PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Indikator	SPM	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah			Reliasasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Penyelesaian Batas Daerah *Sudah Selesai di Tahun 2023 tidak menjadi iku lagi*			100%	100%	100%	100%	-	-	-	
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) *tidak menjadi iku lagi			100%	100%	100%	-	-	-	-	
3	Persentase kerjasama yang terealisasi *tidak menjadi iku lagi*			100%	100%	100%	100%	-	-	-	
4	Jumlah Penetapan Batas Wilayah Antar Provinsi			7 Pilar	7 Pilar	7 Pilar	-	-	-	-	

5	Fasilitasi Pergantian Antar Waktu DPRD Kab/Kota			15	15	15	-	-	-	-	
6	Jumlah kerjasama yang terealisasi			25	30	35	-	-	-	-	

3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi Provinsi Sumatera Utara, telaahan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Provinsi Sumatera Utara baik laki-laki maupun perempuan yang diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai agama yang terwujud dalam perilaku yang bermoral.
- b. Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan dan sengketa peruntukan penggunaan lahan. Sengketa kepemilikan tanah sering kali disebabkan karena kurang pemahannya masyarakat tentang peraturan kepemilikan tanah. Terjadinya sengketa secara tidak langsung akan menghambat perekonomian masyarakat. Banyaknya kasus pertanahan bisa menghambat jalannya pembangunan. Pembangunan jalan baru sering kali terkendala dalam pembebasan lahan. Hal tersebut menghambat penambahan akses jalan untuk mendukung laju perekonomian.
- c. Sebagian besar daerah cenderung tidak terlalu memperhatikan Kerjasama Antar Daerah melalui Tim TKKSD terkait, hal tersebut dikarenakan daerah kurang menyadari potensi yang bisa dikerjasamakan. Pemerintah Provinsi bisa berperan dalam hal mengkaji potensi-potensi kerjasama tersebut.
- d. Permasalahan Penataan Batas Wilayah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

4. **Review Terhadap RKPD**

Penyusunan rencana kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dengan usulan sebesar Rp. 6.017.236.034,- (Enam milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program/kegiatan dan terdapat rumusan program, kegiatan dan subkegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program, kegiatan dan subkegiatan cocok namun besaran pagunya berbeda.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,026,640,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sumatera Utara	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,117,236,034	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara			8,910,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara			-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	8,910,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	-	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara			7,920,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara			-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	7,920,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	-	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	22,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	20,300,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	22,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	20,300,000	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	899,731,448	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	1,071,936,034	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	49,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	54,700,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	220,011,748	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	200,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57,568,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	572,651,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	717,236,034	
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	956,133,772	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	965,000,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7,480,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	948,653,772	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	950,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	131,944,780	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	60,000,000	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	131,944,780	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	60,000,000	
B.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	7,084,000,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	3,900,000,000	
I.	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	2,035,000,000	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	1,400,000,000	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	935,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	600,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1,100,000,000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	800,000,000	
II.	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	3,245,000,000	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	1,800,000,000	
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	1,650,000,000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	850,000,000	
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	605,000,000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	350,000,000	
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	990,000,000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	600,000,000	
III	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sumatera Utara	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	1,804,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Sumatera Utara	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	700,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	660,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	300,000,000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	528,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	616,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Sumatera Utara	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	200,000,000	

1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu pada Tahun 2025 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu.

Tabel T-C.3.2.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

2. Penelaahan Hibah dan Bansos untuk masyarakat

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu pada Tahun 2025 tidak melaksanakan penelaahan Hibah dan Bansos untuk masyarakat.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan Rakyat Non

Pelayanan Dasar belum mencapai angka 75% karena masih terdapatnya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akibat kurangnya personel untuk melakukan pengerjaan kegiatan ini dalam hal berkunjung ke daerah-daerah di Sumatera Utara.

b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Data dan informasi mengenai pelaksanaan hibah di Wilayah Provinsi Sumatera Utara telah optimal namun belum sempurna karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan dokumen maupun cara melengkapi dokumen tersebut.
- 2) Tidak adanya standarisasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan kegiatan pemberian hibah bagi masing-masing penerima hibah maka hasilnya tidak dapat diprediksi dan tidak sesuai yang diinginkan.
- 3) Masih kurangnya pemahaman tentang hibah dan laporan pertanggungjawaban hibah dari calon penerima hibah di Wilayah Sumatera Utara.
- 4) Padatnya volume kegiatan kerja yang membuat beberapa pekerjaan harus dilakukan pada waktu yang sama sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

c) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, antara lain:

- 1) Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah di Sumatera Utara;
- 2) Terlaksananya perayaan hari besar Kenegaraan dan Keagamaan di wilayah Sumatera Utara;

- 3) Terlaksananya pembanngunan dan rehabilitasi Sekolah Swasta, Pesantren, dan TPA di Wilayah Sumatera Utara;
 - 4) Terlaksananya penyelenggaraan Keberangkatan dan Pemulangan Jamaah Ibadah Haji di Wilayah Suamtera Utara.
- d) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemberian bantuan hibah di Wilayah masyarakat;
2. Minimnya *database* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan bantuan hibah di Wilayah Sumatera Utara;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
4. Belum adanya pemisahan tugas yang jelas dengan OPD rekanan terkait tugas dan fungsi masing-masing OPD, yang sering memperlambat kegiatan pekerjaan.

Untuk mengatasi isu dan permasalahan di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu perlu berbenah dan menata secara kelembagaan serta membangun sinergisitas dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat mengingat Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan maupun pelayanan Perangkat daerah lainnya.

Selanjutnya bahwa wibawa Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tercermin dari meningkatnya pembangunan dan standard hidup masyarakatnya. Peningkatan pembangunan dan standard hidup masyarakat tampak dari terfasilitasinya sarana dan prasarana rumah ibadah dan sekolah di Wilayah Sumatera Utara.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024-2026
Provinsi Sumatera Utara**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>outcomes</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-3)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	75%	73,81%				16,900,000,000	51,819,692,033	99.33%
4 01 01 101	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase proposal hibah yang di tindaklanjuti	75%	75,08%				80,000,000	249,533,450	99.73%

2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (Good Governance).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, antara lain:

- a) Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah serta materi dan komunikasi Pimpinan.
- b) Alokasi anggaran yang dimiliki Biro Kesejahteraan Rakyat saat ini perlu digunakan dan diberdayakan dengan optimal dan segera. Mengingat banyaknya kegiatan dan jumlah proposal hibah yang perlu direalisasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu perlu melakukan penataan dan penguatan organisasi, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penataan dan penguatan ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan OPD, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat.

3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta fasilitasi mental spiritual, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Urusan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

C. Biro Hukum

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Hukum Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang

disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023-2026. Adapun penyusunan Renja Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Biro Hukum SetdaprovSU Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025; dan
 - 2) Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjagastabilitas dan konsistensi pembangunan.
- A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan target (pagu) senilai Rp. 2.314.886.300, telah terealisasi sebesar Rp. 2.247.027.388, dengan persentase capaian sebesar 97,07%, rincian kegiatannya:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 152.040.000, telah terealisasi sebesar Rp. 152.040.000, dengan persentase capaian sebesar 100,00%.
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 394.984.000, telah terealisasi sebesar Rp. 367.103.800, dengan persentase capaian sebesar 92,94%.

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 1.352.871.700, telah terealisasi sebesar Rp. 1.343.542.150, dengan persentase capaian sebesar 99,31%.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan target (pagu) senilai Rp. 401.990.600, telah terealisasi sebesar Rp. 371.841.438, dengan persentase capaian sebesar 92,50%
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target (pagu) senilai Rp. 13.000.000, telah terealisasi sebesar Rp. 12.500.000, dengan persentase capaian sebesar 96,15%
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan target (pagu) senilai Rp. 2.759.261.700, telah terealisasi sebesar Rp. 2.598.711.948, dengan persentase capaian sebesar 94,18%, rincian kegiatannya:
- a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, dengan target (pagu) senilai Rp. 1.093.787.700, telah terealisasi sebesar Rp. 1.059.246.318, dengan persentase capaian sebesar 96,84%
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan target (pagu) senilai Rp. 1.665.474.000, telah terealisasi sebesar Rp. 1.539.465.630, dengan persentase capaian sebesar 92,43%.

Terkait dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2024 ada 2 (dua) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan rincian:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
- 2) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan perangkat daerah lain.
- 4) Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.

- 5) Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
- 6) Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
- 7) Masih kurangnya Aparatur dalam melaksanakan penanganan perkara Di Lingkungan Pemprovsu.
- 8) Kurang memadainya sarana dan prasarana kantor sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
- 9) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
- 10) Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik Kabupaten/kota.

C. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, antara lain:

1. Bahwa draft ranperda yang masuk ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provsu belum semuanya dapat dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini tentunya berdampak kepada Pembangunan di Sumatera Utara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Masih minimnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Evaluasi terhadap ranperda Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya berdampak kepada Tugas dan Fungsi Gubernur sebaga Pembina dan Pengawas Peraturan Daeah Kabupaten/Kota dan berdampak terhadap pelaporan ke Pemerintah Pusat.
3. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.
4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

5. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Biro Hukum Setdaprovsu berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Perangkat Daerah.
- D. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak Perangkat Daerah, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2024) yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum Setdaprovsu didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Biro Hukum Setdaprovsu.
10. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan Perangkat Daerah lain.

Dalam perkembangan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Biro Hukum Setdaprovsu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah lain.

Berikut adalah Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021
Biro Hukum SetdaprovSU
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi dan Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra PERANGKAT DAERAH				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
1.	Jumlah rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	-	-	500 Produk hukum	880 Produk hukum	880 Produk hukum	880 Produk hukum	1.334 produk hukum	250 Produk hukum	880 Produk hukum	900 Produk hukum	-
2.	Jumlah rancangan produk hukum daerah Kab/ Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi	-	-	70 Ranperda Kab/ Kota	700 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	71 Ranperda Kab/ Kota	100 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	700 Perda/ Perkada	-
3.	Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan	-	-	30 Produk hukum	30 Produk hukum	30 Produk hukum	30 Produk hukum	30 produk hukum	10 Produk hukum	30 Produk hukum	30 Produk hukum	-
4.	Jumlah penanganan perkara hukum di Pengadilan	-	-	25 perkara	25 perkara	25 perkara	25 perkara	31 perkara	20 perkara	25 perkara	25 perkara	-
5.	Jumlah penanganan perlindungan HAM	-	-	10 kasus	15 kasus	15 kasus	15 kasus	14 kasus	10 kasus	15 kasus	15 kasus	-

3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Hukum SetdaprovSU sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Nasional, Biro Hukum Setdaprovsu menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Belum terlaksananya dengan baik Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
5. Belum maksimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Masih rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Belum maksimalnya Penyuluhan Hukum;
8. Belum terlaksananya dengan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

Adapun strategi Biro Hukum Setdaprovsu untuk menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah:

1. Penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas setiap pegawai sesuai bidang tugasnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dalam memberdayakan pegawai.
2. Menumbuhkan komitmen bersama dalam konsistensi tindakan pada setiap pelaksanaan tugas.
3. Pengelolaan data-data penting secara lebih akurat untuk penyusunan perencanaan, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan kinerja serta penyusunan bahan monitoring dan evaluasi.

4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum untuk pelaksanaan perencanaan dalam melakukan pengkajian ulang produk hukum daerah.
5. Peningkatan koordinasi atas pelanggaran HAM dikalangan aparaturnya penegak hukum, lembaga sosial dan Perguruan Tinggi.
6. Proses perancangan, perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu melibatkan kajian akademis dari kalangan Perguruan Tinggi, Lembaga Sosial dan Asosiasi sehingga proses penerbitan Perda dapat diterima masyarakat;
7. Perlu adanya peningkatan peranan Panitia RanHAM Provinsi Sumatera Utara untuk memonitoring pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dengan bekerjasama instansi aparat penegak hukum.
8. Diperlukan Peningkatan dan pengembangan metode teknis penyuluhan hukum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
9. Peningkatan sosialisasi Produk Hukum Daerah sebagai upaya pelayanan informasi kepada masyarakat dan aparaturnya.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan akuntabel.
11. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu.
12. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
13. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pembangunan.
14. Pengembangan sumberdaya aparaturnya untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
15. Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelas.
16. Memberdayakan peran SDM Aparaturnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan.
17. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangan dalam perencanaan dan pengendalian penganggaran.
18. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, memuat program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing Perangkat Daerah masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah, yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, maka penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang diperuntukkan bagi Biro Hukum Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Hukum Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2025, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan.

Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Hukum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Usulan program dan kegiatan dari Biro Hukum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu.

Dalam Tabel 2.4. dapat dilihat program dan kegiatan pada Biro Hukum Setdaprovsu yang telah tercantum dalam Rancangan Awal RKPD Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dan analisa kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Hukum Setdaprovsu pada Tahun 2023 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Hukum Setdaprovsu.

Tabel. 7
Usulan Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

D. Biro Perekonomian

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023 dan sampai dengan triwulan I tahun 2024 serta perkiraan target pada tahun 2024.

- a) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan I, II, III dan IV tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pada Tahun 2022 berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 99,61%, realisasi anggaran sebesar 97,07%.
- Kegiatan pada sampai dengan akhir Desember 2023, keuangan kegiatan terealisasi sebesar Rp.3,553,188,548,- (98,23%), sementara fisik kegiatan sebesar 100%.

b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah:

- Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana/fungsional umum yang kompeten untuk mendukung tugas-tugas Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi.

c) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- Masih terbatasnya tenaga teknis yang berkompenten dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.
- Integrasi data yang belum memadai.
- Masih kurangnya SDM di Biro Perekonomian.
- Kurang optimalnya prosedur kerja dan tata kerja.

d) Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk penambahan sumber daya manusia pada Biro Perekonomian Setda Provsu.
- Mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- Lebih meningkatkan inovasi dan inisiatif kerja

Tabel. 8
Hasil Pengukuran Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	100 %	100%	100
		Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat	100 %	57,14%	57,14

Berdasarkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagaimana tertera pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi dari target kinerja Biro Perekonomian untuk beberapa sasaran sudah dapat direalisasikan dengan baik dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Biro Pengadaan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tabel T-C.29 berikut

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%	97,71%	100%	100%	100,00%	100,00%	297,71	330,79%
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi keuangan dengan baik</i>	<i>90%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>90,00%</i>	<i>24 bulan</i>	<i>100,00%</i>
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 bulan	12 Dokumen	12 dokumen	100,00%	12 Dokumen	36 Dokumen	300,00%
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi</i>	<i>22 Orang</i>	<i>15 orang</i>	-	-	<i>0,00%</i>	<i>30 Orang</i>	<i>45 Orang</i>	<i>204,55%</i>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	15 orang	-	-	0,00%	20 Orang	35 Orang	175,00%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit					1 unit	1 unit	100,00%
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Kegiatan Adminstrasi Umum Biro Perekonomian</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 Bulan</i>	<i>300,00%</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	1 Paket	6,67%	15 Paket	16 Paket	106,67%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	1. 1448 unit 2. 3955 kotak	2500 paket	2779 Paket	111,16%	2500 paket	6727 Paket 3955 kotak	269,08%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 bulan	12 paket	12 paket	100,00%	12 paket	36 Paket	300,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	6 bahan bacaan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	18 dokumen	300,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	1. 36 kali 2. 11 Kali	35 Laporan	48 Laporan	137,14%	35 Laporan	130 Laporan	371,43%
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya pendistribusian surat-menyurat Biro Perekonomian</i>	<i>0%</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>350 Surat</i>	<i>350 Surat</i>	<i>100,00%</i>		<i>350 surat</i>	<i>0,00%</i>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	387 Surat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	0,00%	<i>12 Laporan</i>	0,00%
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara secara rutin</i>	<i>10 unit</i>	<i>33 unit</i>	<i>10 unit</i>	<i>30 unit</i>	<i>300,00%</i>	<i>10 unit</i>	<i>73 Unit</i>	<i>730,00%</i>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	33 unit	10 unit	30 unit	300,00%	10 unit	73 Unit	730,00%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	83,68%	100%	108,33%	108,33%	100,00%	291,96	291,96%
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i>	<i>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>95%</i>	<i>63%</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>100,00%</i>	<i>95,00%</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Jumlah Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Perekonomian</i>			<i>12 Laporan</i>	<i>17 Laporan</i>	<i>141,67%</i>		<i>17 Laporan</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Jumlah kesesuaian pelaksanaan kebijakan perekonomian</i>			<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100,00%</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian</i>			<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>100,00%</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>0,00%</i>

		<i>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>			<i>2 Dokumen</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>100,00%</i>		<i>2 dokumen</i>	<i>0,00%</i>
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	14 kab/kota 1 Roadmap Pengendalian Inflasi 3 Kali Rakor	2 Dokumen	4 dokumen	200,00%	2 Dokumen	6 dokumen 14 kab/kota 1 Roadmap Pengendalian Inflasi 3 Kali Rakor	300,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	1 Publikasi 28 Kab/Kota 1 Roadmap TPAKD 5 kali rakor	2 Dokumen	4 dokumen	200,00%	2 Dokumen	6 Dokumen 1 Publikasi 28 Kab/Kota 1 Roadmap TPAKD 5 kali rakor	300,00%
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i>	<i>Jumlah dokumen Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan SDA</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>77%</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>6 dokumen</i>	<i>300,00%</i>
		<i>Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Pengelolaan SDA</i>			<i>3 dokumen</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>100,00%</i>		<i>3 dokumen</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan SDA</i>			<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>100,00%</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>0,00%</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	1 Aplikasi pengawasan pupuk 15 Kab/kota 3 Kali rakor	12 dokumen	26 dokumen	216,67%	12 dokumen	38 dokumen 1 Aplikasi pengawasan pupuk 15 Kab/kota 3 Kali rakor	316,67%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	7 kab/kota	8 dokumen	24 Dokumen	300,00%	8 dokumen	39 dokumen	487,50%

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	16 kab/kota 1 kali rakor	12 dokumen	22 Dokumen	183,33%	12 dokumen	50 dokumen	416,67%
	<i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>111,11%</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>100,00%</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>6 dokumen</i>	<i>200,00%</i>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	1 Aplikasi 1 Aplikasi 17 Kab/Kota 1 Perda Jamkrida	15 dokumen	33 Dokumen	220,00%	15 dokumen	48 Dokumen 1 Aplikasi 1 Aplikasi 17 Kab/Kota 1 Perda Jamkrida	320,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	12 dokumen	20 kab/kota 1 BUMD	12 dokumen	20 Dokumen	166,67%	12 dokumen	32 Dokumen 20 kab/kota 1 BUMD	266,67%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen	16 kab/kota 1 Kali	12 dokumen	20 Dokumen	166,67%	12 dokumen	32 Dokumen 16 kab/kota 1 Kali	266,67%

Dari tabel diatas menyajikan data realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang didasarkan pada Renstra Biro Perekonomian Tahun 2019-2023 dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan tabel T-C. 29 di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata realisasi anggaran per kegiatan mencapai 98%. Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 356.628.400,- dengan tolok ukur kinerja adalah terlaksananya administrasi keuangan dengan baik. Adapun 1 (satu) sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN. Anggaran sebesar Rp356.628.400 dengan realisasi sebesar Rp356.628.400 (100,00%)

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, namun dilakukan efisiensi pada perubahan APBD dikarenakan tidak adanya undangan mengikuti diklat sampai dengan akhir tahun.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 878.026.982,- dengan tolok ukur kinerja adalah terlaksananya kegiatan administrasi umum Biro Perekonomian. Adapun 5 (lima) sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan

kantor yang disediakan. Anggaran sebesar Rp22.074.990 dengan realisasi sebesar Rp20.150.000 (91,28%).

➤ **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Anggaran sebesar Rp267.939.992 dengan realisasi sebesar Rp 267.282.200 (99,75%).

➤ **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Anggaran sebesar Rp 99.988.240 dengan realisasi sebesar Rp 99.653.240 (99,66%).

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan. Anggaran sebesar Rp 12.244.760 dengan realisasi sebesar Rp 10.265.000 (83,83%).

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan. Anggaran sebesar Rp 475.779.000 dengan realisasi sebesar Rp 473.819.750 (99,59%).

4. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan tolok ukur kinerja adalah jumlah barang milik daerah yang dipelihara secara rutin. Adapun 1 (satu) sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Anggaran sebesar Rp 20.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 20.000.000 (100,00%).

B. **Program Perekonomian dan Pembangunan**

1. **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 995.228.358 dengan tolok ukur kinerja adalah Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Perekonomian. Adapun 2 (dua) sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro. Anggaran sebesar Rp 286.854.000 dengan realisasi sebesar Rp 279.298.800 (97,37%).

➤ Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi mikro. Anggaran sebesar Rp 708.374.358 dengan realisasi sebesar Rp 685.497.158 (96,77%).

2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.571.650 dengan tolok ukur kinerja adalah jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA. Adapun 3 (tiga) sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Anggaran sebesar Rp 316.151.000 dengan realisasi sebesar Rp 308.864.100 (97,70%).

➤ Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup dengan anggaran sebesar Rp 134.143.000 dengan realisasi sebesar Rp (99,72%).

➤ Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air dengan anggaran sebesar Rp 204.904.150 dengan realisasi sebesar Rp 202.322.800 (98,74%).

3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 708.354.600 dengan tolok ukur kinerja adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolan, Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD. Adapun 3 (tiga) sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

➤ Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha. Anggaran sebesar Rp 293.521.000 dengan realisasi sebesar Rp 284.400.300 (96,89%)

➤ Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi. Anggaran sebesar Rp 172.203.000 dengan realisasi sebesar Rp 171.606.000 (99,65%)

➤ Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan output sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Anggaran sebesar Rp 242.630.600 dengan realisasi sebesar Rp 235.757.800 (97,17%).

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang telah ditetapkan, sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian Setdaprovsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi, air dan sanitasi, pariwisata, perizinan dan investasi, perhubungan, BUMD dan BLUD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Analisis Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel. 10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara:

No	Indikator	SPM/ Standar Minimal	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat			100%	100%	100%	57,14%	-	50%	66,67%
3.	Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi			100%	100%	100%	n/a	-	100%	100%

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, jika hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula.

Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah:

1. Belum optimalnya dukungan Kebijakan Pemerintah daerah dalam mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Daerah yang tinggi dan berkualitas.
2. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
3. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD/BLUD untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
4. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu.

Sedangkan untuk tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yaitu:

1. Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian.
- c. Adanya Pelaksanaan Kebijakan Satu Data.

2. Ancaman/Tantangan (Threat)

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Biro Perekonomian yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur yang profesional di bidangnya.
- b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di bidang perekonomian.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dalam rangka E-Government Bidang Perekonomian;
- d. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 13
Reviu terhadap RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Utara

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%	1,589,694,400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase pemenuhan layanan administrasi	90%	1,589,694,400	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	409.756.215	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 bulan	451,051,200	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	409.756.215	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	451,051,200	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	10 orang	260.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	10 orang	71,954,700	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 unit	160.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 unit	62,304,700	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	9,650,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	12 bulan	1,046,688,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	12 bulan	1,046,688,500	

4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	123,449,150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	123,449,150	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	280,125,262	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2500 Paket	280,125,262	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	110,394,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	110,394,000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9,150,088	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	9,150,088	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	523,570,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	523,570,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	10 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	10 Unit	20,000,000	
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sumatera Utara	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2,910,305,600	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sumatera Utara	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	100%	2,910,305,600	
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90%	1,064,017,000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Sumatera Utara	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	90%	1,064,017,000	
10	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	515,734,000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	515,734,000	

11	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	548,283,000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	548,283,000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Sumatera Utara	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	849,567,000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Sumatera Utara	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3 dokumen	849,567,000
12	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	324,122,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dokumen	324,122,000
13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	201,747,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	8 dokumen	201,747,000
14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	323,698,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dokumen	323,698,000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Sumatera Utara	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3 dokumen	996,721,600	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Sumatera Utara	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	3 dokumen	996,721,600
15	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	398,755,600	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	15 dokumen	398,755,600
16	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	12 dokumen	298,914,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	12 dokumen	298,914,000

	Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi		Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			
17	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen	299,052,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	12 dokumen	299,052,000	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (*bottom-upplanning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

6. Penelaahan Hibah dan Bansos untuk Masyarakat

Program dan Kegiatan pada Biro Perekonomian tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD terkait hibah dan bansos untuk Masyarakat.

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023 dan sampai dengan triwulan I tahun 2024 serta perkiraan target pada tahun 2024.

A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan sampai dengan triwulan I, II, III dan IV tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pada Tahun 2022 berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, realisasi anggaran sebesar 97,10%.
2. Kegiatan pada Triwulan I sampai IV tahun 2023 berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 70,73% dengan realisasi anggaran 42,66%.

B. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana/fungsional umum yang kompeten untuk mendukung tugas-tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
2. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

C. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

1. Keterbatasan personil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
2. Pengguna (PA, KPA, dan PPK) belum memahami ketentuan pengadaan barang/jasa sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan.

D. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan usulan kepada Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara untuk penambahan personel dari OPD PemprovSU yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1 untuk diusulkan perpindahan jabatan dari jabatan lain menjadi Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa serta Fungsional Umum.
2. Pembinaan dan penguatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa dengan melaksanakan Bimtek kepada PPK dan Pokja Pemilihan terkait serta Pejabat Pengadaan.

2. Analisa Kinerja Pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU

Tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun 2022 dan rencana kerja sampai dengan triwulan I dan II tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel 15
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2021 Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023 (TW-IV)	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			100%	100%	100%	100%	84,31%	-	-	
2	17 Standarisasi LPSE			100%	100%	100%	100%	57,14%	-	-	

3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.

- b. Dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik setiap triwulan, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- c. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- d. Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun UKPBJ Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Melibatkan UMK dan Penyedia melalui kegiatan yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga Kegiatan dan Program bisa tercapai.

Sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, seperti Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta membantu Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan usulan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan

Rencana Kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagaimana tabel T-C.21 (terlampir).

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU pada Tahun 2025 tidak melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU.

Tabel. 17
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Provinsi Sumatera Utara
Biro Pengadaan Barang dan Jasa SetdaprovSU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

F. Biro Administrasi Pembangunan

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra PD

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU selama tahun 2023 dan perkiraan target pada tahun 2025.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2023 seluruh sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai Tingginya aktivitas Pegawai dalam memfasilitasi kegiatan Pembangunan.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, antara lain: Kurangnya kepedulian Admin Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penginputan pada Aplikasi PRP2SUMUT.

- d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut: Dibutuhkan penambahan Pegawai agar pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pembangunan berjalan dengan baik

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		
					Target Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		792.769.753	809,416,107	792.769.753	97.94%
4 01 01 1 01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian yang dikelola dengan Baik	-	-	1.200.000	1.200.000	100%
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	1.200.000	1.200.000	100%

4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.000.000	241.772.265	216.000.000	189.565.869	87,76%
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.000.000	241.772.265	216.000.000	189.565.869	87,76%
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	331,957,050	538.648.738	552,474,300	538.648.738	97,50%
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85.000.000	-	28.329.940	20.040.000	70,74%
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Presentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	140.000.000	-	-	-	-
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum	331,957,050	538.648.738	552,474,300	538.648.738	97,50%

							Perangkat Daerah					
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17,514,000	64.610.000	65,300,000	64.610.000	98,94%
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29,073,050	44.547.242	45,398,300	44.547.242	98,13%
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,370,000	429.491.496	441,776,000	429.491.496	97.22%
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,250,000	12.348.750	12,500,000	12.348.750	98,79%
4	01	01	1	08	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,250,000	12.348.750	12,500,000	12.348.750	98,79%
4	01	08				PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan	3,731,165,566		3,015,835,560		

4	01	08	1	01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2,252,638,361	2.951.830.540	3,015,835,560	2.951.830.540	97,88%
4	01	08	1	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1,497,319,111	2.021.674.688	2,059,436,310	2.021.674.688	98,17%
4	01	08	1	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	153,780,000	217.550.371	218,034,000	217.550.371	99.78%
4	01	08	1	1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	601,539,250	712.605.121	738,365,250	712.605.121	96,51%
4	01	08	1	2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	1,478,527,205	1.238.818.618	1,372,637,955	1.238.818.618	90,25%
4	01	08	1	2	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisisi capaian Kinerja	1,001,591,950	642.032.683	683.169.950	642.032.683	93,98%

4	01	08	1	2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	319,792,000	419.653.241	476,197,900	419.653.241	88,13%
4	01	08	1	2	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	157,143,255	177.132.694	213,270,105	177.132.694	83,06%

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mempunyai tugas menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi serta Program Kebijakan Administrasi Pembangunan dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 95.87%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovs yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel 18.
Rencana Kerja Anggaran Perubahan menurut Program Kerja dan Kegiatan Biro
Administrasi Pembangunan Setdaprovsu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2025	2022	2023	2025	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah			25 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	20 Dokumen	-	-	

2	Persentase Realiasi Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah			95%	95%	98%	95,49%	98,01%	-	-	
---	---	--	--	-----	-----	-----	--------	--------	---	---	--

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan Pengendalian di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, antara lain:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan Pembangunan dan kebijakan Pembangunan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan

yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2025 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dengan usulan sebesar Rp. 4.757.503.915,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan ratus Lima Belas Rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 21

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Realisasi Anggaran Biro Pengadaan Barang dan

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU											Catatan Penting	
Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No.	Prog/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Prog/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1.962.503.915	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1.962.503.915	5	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	130.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	130.000.000		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dok	130.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dok	130.000.000		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	225.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	225.000.000		

			Perangkat Daerah								
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Kegiatan	140.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Kegiatan	140.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	85.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	85.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	995.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	995.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	120.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	120.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	115.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	115.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.000 Paket	160.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.000 Paket	160.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	600.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	532.503.712	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	532.503.712	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang	532.503.712	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang	532.503.712	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80.000.203	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80.000.203	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	80.000.203	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	80.000.203	

			yang Dipelihara								
7	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	1.675.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	1.675.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	15 Dokum en	495.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	15 Dokum en	495.000.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	15 Dokum en	480.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	15 Dokum en	480.000.000	
8	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi	10 Dokum en	700.000.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	10 Dokum en	700.000.000	

	Pembangunan Wilayah		Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			Pembangunan Wilayah		Pembangunan Wilayah			
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.120.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.120.000.000	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Analisis capaian Kinerja	2 Laporan	500.000.000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Analisis capaian Kinerja	2 Laporan	500.000.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	15 Laporan	370.000.000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	15 Laporan	370.000.000	
	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	5 Laporan	250.000.000	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	5 Laporan	250.000.000	

5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada Tahun 2025 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tidak Ada			

G. Biro Organisasi

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU.

Biro Organisasi SetdaprovSU menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Rencana Kerja Tahun 2021 Biro Organisasi SetdaprovSU memiliki 2 (dua) program 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.333.909.010,- yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 10 Sub kegiatan;

2. Program Penataan Organisasi dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

Dari hasil evaluasi rencana kerja terhadap Program dan kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan dan capaian kinerja 100,00%. Untuk keuangan terealisasi sebesar Rp. 3.128.161.191,- (93,83%) dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.333.909.010,- ada sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 205.747.819,- hal ini disebabkan adanya sisa komulatif dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel. 23
Pencapaian Kinerja Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yaitu:

No	Indikator	Capaian 2020	2021			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2023
			Target	Realisasi	Rasio Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Penataan Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Pelayanan Publik.	B 3,68	B 3,80	B 3,80	100% 3,80	A- 4,20	A- 4,25
3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja	9,11	12	11,75	B	15	100%

2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu

a. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah adalah efisiensi struktur dengan slogan “Tepat Struktur dan tepat Fungsi” pada Pasal 16 huruf c Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat

(4) menyebutkan bahwa pengendalian Perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara evaluasi Struktur Organisasi; besaran organisasi; susunan Perangkat Daerah; perwadahan perumpunan; tugas dan fungsi serta tata cara Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penegandalian penataan perangkat daerah dalam hal produktifitas dan efisien struktur organisasi guna mempercepat pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dalam rangka Reformasi Birokrasi di bidang kelembagaan dan dengan tujuan meningkatkan kemampuan daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju Perangkat Daerah yang modern berdasarkan UU No 23 Tahun 20143 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Permendagri No 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Untuk itu Pemprovsu telah menindaklanjutinya dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provsu dengan melaksanakan restrukturisasi Perangkat Daerah dari 49 Perangkat Daerah menjadi 40 Perangkat Daerah, Ranperda telah diusulkan untuk Fasilitasi Kemendagri dan sampai saat ini masih proses Fasilitasi Kemendagri.

Tabel. 24

Daftar Restrukturisasi Perangkat Daerah Provsu yang dilakukan Biro Organisasi Setdaprovsu

NO.	OPD EKSISTING	NO.	HASIL RESTRUKTURISASI
1	2	3	4
1	Sekretariat DPRD	1	Sekretariat DPRD
2	Inspektorat	2	Inspektorat
3	Dinas Pendidikan	3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan

6	Dinas Kesehatan	6	Dinas Kesehatan
7	Rs. Umum Haji Medan	6.A	Upt. Khusus rs. Umum haji medan
8	Rs. Jiwa prof. Dr. M. Ildrem	6.B	Upt. Khusus rs. Jiwa prof. Dr. M. Ildrem
9	Dinas Sosial	7	Dinas Sosial
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB		
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
14	Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang	10	Dinas Pekerjaan Umum
15	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang
17	Dinas Perhubungan	12	Dinas Perhubungan
18	Dinas Lingkungan Hidup	13	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19	Dinas Kehutanan		
20	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	14	Dinas Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		
22	Dinas Perkebunan	15	Dinas Perkebunan dan Peternakan
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	16	Dinas Kelautan dan Perikanan
24	Satuan Polisi Pamong Praja	17	Satuan Polisi Pamong Praja
25	Dinas penanaman modal dan Pelayanan perizinan terpadu satu pintu	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26	Dinas Tenaga Kerja	19	Dinas Ketenagakerjaan
27	Dinas Koperasi dan UKM	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
29	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	22	Dinas Komunikasi dan Informatika

30	Dinas Komunikasi dan Informatika		
31	Dinas Perpustakaan Danarsip	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
34	Badan Penelitian dan Pengembangan		
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
36	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	27	Badan Pendapatan Daerah
37	Badan Kepegawaian Daerah	28	Badan Kepegawaian
38	Badan Pengembangansumber Daya Manusia	29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
40	Badan Penghubung	31	Badan Penghubung
41	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	32	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
42	Biro Kesejahteraan Rakyat	33	Biro Kesejahteraan Rakyat
43	Biro Hukum	34	Biro Hukum
44	Biro Perekonomian	35	Biro Perekonomian
45	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	36	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
46	Biro administrasi Pembangunan	37	Biro Administrasi Pembangunan
47	Biro Organisasi	38	Biro Organisasi
48	Biro Umum	39	Biro Umum
49	Biro Administrasi Pimpinan	40	Biro Administrasi Pimpinan

Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Surat Gubsu Nomor 061/10868 tanggal 21 Oktober 2019 hal Evaluasi UPT, serta PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan ats Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah melaksanakan evaluasi penataan kelambagaan UPTD dan Cabdis pada Dinas, Badan Provsu dengan melakukan monitoring/survey kelapangan Tahun 2019 s/d 2020;
- b. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 21 ayat (1) menyatakan pada urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional maka RSUD Haji Medan Provsu dan RSJ. Prof. M. Ildrem menjadi UPTD Dinas Kesehatan Provsu;

Sehubungan dengan huruf a dan huruf b, telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draf Pergub SOTK UPTD dan Cabdis pada Dinas dan Badan Provsu dan telah diusulkan ke Kemendagri untuk difasilitasi, dan sampai saat ini menunggu rekomendasi Kemendagri RI Jakarta.

1. Untuk Evaluasi Penataan Kelembagaan, Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provsu, telah dilaksanakan dengan melakukan Evaluasi Perda dan Perbup/Perwal hasilnya adalah rekomendasi Provinsi untuk ke Kabupaten/Kota.
2. Sesuai Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemprovsu telah menindaklanjuti melalui usulan sebanyak 500 Jabatan Administrasi dan Pengawas, mendapatkan rekomendasi persetujuan melalui Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/5863/OTDA tanggal 10 September 2021 hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maka sebanyak 452 Pejabat Administrasi dan Pengawas, 48 Jabatan tidak direkomendasikan untuk dilantik. Pemprovsu telah melaksanakan Pelantikan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional sebanyak 381 Pejabat Administrasi dan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2021 di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu dan terdapat 71 (tujuh puluh satu) Jabatan Administrasi yang tidak dilakukan pelantikan kedalam Jabatan Fungsional disebabkan terdapat jabatan yang lowong dan perubahan nama pejabat dari hasil

persetujuan akibat adanya promosi jabatan, memasuki pensiun dan meninggal dunia.

3. Sehubungan dengan point ke 3 (tiga) maka PemprovSU telah menindaklanjutinya dengan penyusunan draf Pergub SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara; DraF Pergub Susunan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara; DraF Pergub Badan Daerah dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara; dan DraF Pergub Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Utara dan pada saat ini sedang proses pengundangan.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pelaporan Kinerja Memperoleh nilai 7,40 dari bobot 10 untuk capaian tahun 2021.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan, serta melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/115/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kualitas Pelayanan Publik memperoleh nilai 3,80 dari skala 0-5 untuk capaian tahun 2021.

3. Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama

Biro Organisasi SetdaprovSU merupakan unit kerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Organisasi memiliki Indikator Kinerja Utama dalam mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2021. Adapun sasaran dan capaian terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi SetdaprovSU dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 25

Sasaran dan Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi SetdaprovSU

Dari hasil penetapan tujuan dan sasaran terhadap indikator kinerja utama Biro Organisasi SetdaprovSU melalui Rencana Strategis Biro Organisasi SetdaprovSU 2019-2023 hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel. 26
Tujuan dan Sasaran Terhadap Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi SetdaprovSU

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Hasil capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	-	-
			2. Indeks Pelayanan Publik	3,00	3,68	3,80	-	-
			3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.	8,99	9,11	11,75	-	-

4. Review terhadap rancangan awal RKPD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Indeks Pelayanan Publik	2,99	3,51	3,51	4,01	4,02
			3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.	10	11	12	14	15

Pada rancangan awal RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi SetdaprovSU pada Tahun 2021 sebesar Rp. 6.970.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi SetdaprovSU yang diakomodir dalam RKA sebesar Rp. 5.280.041.602,- dari jumlah RKA Biro Organisasi SetdaprovSU yang diakomodir dalam DPA Biro Organisasi SetdaprovSU sebesar Rp. Rp 5.280.041.602,-. Dengan adanya ketersediaan dana untuk tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari rancangan awal.

Rancangan awal RKPD untuk tahun anggaran 2021 dengan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu adalah sebesar Rp.6.113.186.046,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 disajikan dengan Tabel 2.4. (T-C 31) pada lampiran Renja.

a. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022)

Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019 – 2023, Pada rancangan akhir RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2021 sebesar Rp. 3.420.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam DPA sebesar Rp. 3.414.909.010,- terdiri dari 2 Program, 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan.
- 2) Program Penataan Organisasi , 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan.

Target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran Program/Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun Anggaran 2022 Triwulan I (Januari s/d Maret 2022) sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel. 27
Target Maupun Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu

No	Program/Kegiatan		Target Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp.)
1	2		3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21,89%	1.319.559.000	288.889.660
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	20.700.000	7.520.000
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	17.09%	20.700.000	7.520.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31,57	499.220.800	157.590.400
		01 Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	21 Orang	32.78%	378.500.800	124.070.400

	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Orang	27,77%	120.720.000	33.520.000
5	Administrasi Kepegawaian			0%	92.846.000	0
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	0%	92.846.000	0
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17,84%	693.727.200	123.779.260
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	725 Buah	25,00%	70.509.400	17.627.210
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	223496 Lembar	8,01%	126.337.800	10.132.500
	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	400 Orang	0%	35.184.000	0
	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Orang	20,80%	461.696.000	96.019.550
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0%	96.824.000	0
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	0%	96.824.000	0
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0%	3.065.000	0
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	323 Dokumen	0%	3.065.000	0
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0%	10.000.000	0
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	0%	10.000.000	0
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			17,73%	2.462.229.000	436.672.550
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			25,19%	788.697.000	198.699.450
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	100%	43,61%	329.636.000	143.744.500

		02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	100%	7,40%	229.856.000	17.006.150,-
		03	Penataan Analisis Jabatan	100%	16,57%	229.205.000	37.948.800,-
	2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			14,22%	1.673.532.000	237.937.100
		01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	7,42%	418.848.000	31.138.000,-
		02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	100%	13,43%	239.225.000	32.131.000,-
		03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100%	30,54%	165.769.000	50.626.300,-
		04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	100%	12,51%	339.560.000	43.833.400,-
		05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	100%	15,73%	510.130.000	80.244.400,-

H. Biro Umum

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Umum Setdaprovsu Tahun Lalu

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Umum pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Biro Umum Setdaprovsu. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan

Pencapaian target Renstra pada Perangkat Daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kegiatan pada Tahun 2023 berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, realisasi anggaran sebesar 98,11%.

- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.
- Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah:
- A. Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana/fungsional umum yang kompeten untuk mendukung tugas-tugas Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - B. Sepanjang tahun 2023 adanya dilakukan kegiatan pemeliharaan pada mess-mess di lingkungan Setdaprovsu sehingga dalam pengerjaanya terdapat beberapa kamar yang tidak dapat difungsikan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tabel T-C.29 (terlampir).

2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada unit – unit kerja lingkup pemerintah daerah dan masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip Pemerintah yang baik (**Good Governance**) dalam proses pemberian pelayanan publik dalam rangka mendukung pendistribusian surat dan pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH serta penggunaan mess / wisma tamu / pesanggrahan yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu .

Gambaran keberhasilan disini hanya merupakan upaya mengkuantifikasi ukuran ukuran keberhasilan yang tidak terlepas dari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Hal ini disebabkan organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Secara umum pelaksanaan dan fungsi Biro Umum Setdaropvsu telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Kebijaksanaan pada dasarnya adalah ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran agar diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara operasional. Melalui

analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi pencapaian target.

Untuk kepentingan keterarahan pelaksanaan upaya merealisasikan visi dan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan yang berpijak kepada nilai norma yang ada untuk itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Menargetkan batas waktu penyelesaian program kerja dan peningkatan pelaksanaan tugas.
- b. Perlu peningkatan, pemahaman para pejabat pengelola penataan ketatalaksanaan dan peningkatan tatakerja birokrat mengenai pradigma baru dibidang pemerintah dan pembangunan menuju *Good Governance*.
- c. Perlu adanya transparansi program kegiatan Biro Umum kepada masyarakat melalui media informasi.

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023 (TW-IV)	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	10		11	12	13
1	Persentase Fasilitasi Pelayanan Pelayan Kerumahtangaan Pimpinan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
2	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov			100%	100%	100%	91,70%	92,39%	-	-	

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Umum SetdaprovSU, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Umum SetdaprovSU merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pimpinan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Sebagai penyelenggaraan publik dilingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isu-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Umum Setdaprovsu, antara lain:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan
2. Merestruksi staf dan pejabat structural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan committed terhadap tugas dan kewajibannya
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

4. Review Terhadap RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, memuat program dan kegiatan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan prioritas ini baru rancangan awal, dan masing-masing SKPD masih dimungkinkan untuk mengusulkan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masing-masing SKPD. Yang selanjutnya diusulkan sehingga termuat dalam RKPD definitif (yang ditetapkan Gubernur)

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, maka penyusunan Renja Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2023 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yang diperuntukkan bagi Biro Umum Setdaprovsu setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana Biro Umum Setdaprovsu.

Demikian halnya juga program dan kegiatan Biro Umum Setdaprovsu, program dan kegiatan prioritas tahun 2023, yang masuk dalam matrik Rancangan Awal RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 belum sesuai dengan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan, terdapat beberapa perubahan dan penambahan pada program dan kegiatan. Perubahan tersebut antara lain adalah perubahan target capaian kinerja dan perubahan nomenkatur/tata nama kegiatan dan bertambahnya kegiatan. Oleh karena itu, berdasarkan rancangan awal ini, Biro Umum Setdaprovsu mengusulkan program dan kegiatan tambahan untuk dimasukkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Usulan program dan kegiatan dari Biro Umum Setdaprovsu tersebut, merupakan hasil analisis kebutuhan yang diperlukan untuk pelaksanaan visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PERSENTASE	100%	328.532.703.009	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		PERSENTASE	100%	328.532.703.009	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79.686.481.924	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79.686.481.924	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		79.171.452.444	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		79.171.452.444	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		515.029.480	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		515.029.480	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.481.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.481.200.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.481.200.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.481.200.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi	100%	60.125.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi	100%	60.125.000	

			Kepegawaian Perangkat Daerah					Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60.125.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60.125.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	106.622.959.545	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	106.622.959.545	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		16.225.360.670	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		16.225.360.670	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6.375.730.665	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6.375.730.665	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.697.549.460	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1.697.549.460	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5.100.867.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5.100.867.750	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		69.664.778.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		69.664.778.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan		7.558.673.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		7.558.673.000	

			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10.700.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		9.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		9.000.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1.700.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1.700.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	46.028.568.63	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	46.028.568.63	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		176.741.900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		176.741.900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9.914.700.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9.914.700.800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		554.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan		554.400.000	

			Perengkapan Kantor yang Disediakan					dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		35.382.725.93	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		35.382.725.93	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	56.600.598.702	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	56.600.598.702	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		4.676.291.860	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		4.676.291.860	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11.432.993.415	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11.432.993.415	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2.995.319.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2.995.319.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		37.495.994.427	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		37.495.994.427	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	100%	14.463.376.000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala	100%	14.463.376.000	

	Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		13.713.376.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		13.713.376.000	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		500.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		500.000.000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		250.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		250.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	12.889.393.204	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	12.889.393.204	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		5.290.245.886	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		5.290.245.886	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		3.875.256.872,	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		3.875.256.872,	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		3.723.890.446	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		3.723.890.446	

			Daerah yang Disediakan								
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	PERSENTASE	100%	13.324.480.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	PERSENTASE	100%	13.324.480.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	13.324.480.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	13.324.480.000	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		13.324.480.000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		13.324.480.000	
	TOTAL				341.857.183.009					341.857.183.009	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Umum SetdaprovSU pada Tahun 2025 tidak melaksanakan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Umum SetdaprovSU.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara
Nama Perangkat Daerah : Biro Umum SetdaprovSU

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tidak Ada

i. Biro Administrasi Pimpinan

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU selama tahun 2022 dan perkiraan target pada tahun 2023.

Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU terbentuk sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah, pada Rencana Kerja Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target kinerja 100% terealisasi 100%, jika dikaitkan dengan anggaran terealisasi sebesar 81.10%. Kegiatan ini berupa pelatihan bagi Pegawai untuk meningkatkan kualitas Pegawai.

- b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan.

Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah Tingginya aktivitas Pegawai dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan.

- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU, Padatnya kegiatan pimpinan menyebabkan Pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan Pegawai.

- d. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan update data dan informasi pelatihan pegawai untuk meningkatkan kualitas Pegawai.
2. Dibutuhkan penambahan Pegawai agar pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pimpinan berjalan dengan baik.

Tabel 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pogram/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	18,900,000,000	17,833,014 ,534	17,316,020,053	17,086,677,499	98.68 %	16,900,000,000	51,819,692,033	99.33%
4 01 01 1 01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,000,000	46,400,000	123,680,000	123,133,450	99.56%	80,000,000	249,533,450	99.73%
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	19,400,000	56,000,000	56,000,000	100.00 %	30,000,000	105,400,000	100.00%

4	01	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50,000,000	27,000,000	67,680,000	67,133,450	99.19%	50,000,000	144,133,450	99.54%
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,224,726,400	2,027,506,395	2,758,243,997	2,732,762,626	99.08%	3,179,134,200	7,939,403,221	99.57%
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,224,726,400	2,027,506,395	2,758,243,997	2,732,762,626	99.08%	3,179,134,200	7,939,403,221	99.57%
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,172,399,055	2,018,870,404	2,183,580,400	2,132,774,000	97.67%	2,077,225,050	6,228,869,454	98.81%
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1,955,444,055	1,947,160,404	2,119,955,400	2,081,174,000	98.17%	1,861,870,050	5,890,204,454	99.03%
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	216,955,000	71,710,000	63,625,000	51,600,000	81.10%	215,355,000	338,665,000	95.69%

4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,926,507,545	2,887,909,493	2,260,262,214	2,258,672,274	99.93%	2,457,543,532	7,604,125,299	99.97%
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	446,168,189	672,195,864	226,250,300	225,401,500	99.62%	402,277,680	3,333,145,818	99.86%
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	799,819,356	640,531,190	781,765,882	780,905,272	99.89%	798,772,144	2,220,208,606	99.95%
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	280,520,000	163,212,800	280,520,000	280,520,000	100.00%	236,020,000	679,752,800	100.00%
4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	400,000,000	290,142,628	313,476,032	313,454,888	99.99%	356,276,032	959,873,548	100.00%
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,000,000,000	1,121,827,011	658,250,000	658,390,614	100.02%	664,197,676	2,444,415,301	100.01%
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100.00%	13,000,000	39,000,000	100.00%
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	15,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100.00%	13,000,000	39,000,000	100.00%

4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246,900,000	121,397,000	206,550,000	205,117,085	99.31%	264,400,000	590,914,085	99.70%
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246,900,000	121,397,000	206,550,000	205,117,085	99.31%	264,400,000	590,914,085	99.70%
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2,849,040,000	1,827,311,315	1,754,806,690	1,741,218,532	99.23%	2,373,270,218	5,941,800,065	99.67%
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	300,000,000	312,099,349	210,836,690	207,660,200	98.49%	101,130,218	620,889,767	98.98%
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2,359,040,000	1,318,211,966	1,443,970,000	1,434,420,832	99.34%	2,134,140,000	4,886,772,798	99.73%
4	01	01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	190,000,000	197,000,000	100,000,000	99,137,500	99.14%	138,000,000	434,137,500	99.64%
4	01	01	1	14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	7,385,427,000	8,890,619,927	8,015,896,752	7,879,999,532	98.30%	6,455,427,000	23,226,046,459	99.06%
4	01	01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	958,227,000	1,674,271,000	1,385,275,000	1,381,380,000	99.72%	958,227,000	4,013,878,000	99.83%

4	01	01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3,200,000,000	3,299,899,993	2,962,069,656	2,838,753,766	95.84%	2,470,000,000	8,608,643,161	97.73%
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	3,227,200,000	3,916,448,934	3,668,552,096	3,659,865,766	99.76%	3,027,200,000	10,603,514,700	99.87%
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2,227,400,000	0	2,982,600,000	2,940,660,567	99%	2,727,400,000	5,668,060,567	99.27%

2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2024) yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu adalah pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan. Fasilitasi kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 97%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Berikut adalah tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovs yang dituangkan dalam Renstra.

Tabel. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase fasilitasi materi pimpinan			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	
2	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu merupakan unsur staf yang memiliki fungsi perumusan kebijakan pimpinan yang akan dilaksanakan oleh unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, antara lain:

8. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
9. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
10. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
11. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
12. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
13. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
14. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu telah meriviu rancangan awal RKPD, dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat isu-isu aktual dan kegiatan yang bersifat strategis yang dapat membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan.

Rencana kerja 2025 Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu telah mengusulkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dengan usulan sebesar Rp. 18.900.000.000,- (Delapan belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang nantinya dapat direalisasikan kepada setiap program dan kegiatan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU

Nama Perangkat Daerah : Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	18,900,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	18,900,000,000	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dok	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dok	30,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 Eks	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200 Eks	50,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,224,726,400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,224,726,400	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	3,224,726,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	3,224,726,400	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2,172,399,055	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2,172,399,055	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	1,955,444,055	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100%	1,955,444,055	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	216,955,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	216,955,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,926,507,545	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,926,507,545	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Unit	446,168,189	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Unit	446,168,189	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	799,819,356	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	799,819,356	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	280,520,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	280,520,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	400,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	400,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1,000,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1,000,000,000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	1500 Buah	15,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa materai	1500 Buah	15,000,000	

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	246,900,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	246,900,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	246,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	246,900,000	
7	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	2,849,040,000	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100%	2,849,040,000	
	Penyiapan Materi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	100%	300,000,000	Penyiapan Materi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	100%	300,000,000	
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	2,359,040,000	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	2,359,040,000	
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100%	190,000,000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	100%	190,000,000	
8	Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	100%	7,385,427,000	Fasilitasi Keprotokolan	Sumatera Utara	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	100%	7,385,427,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%	958,227,000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	100%	958,227,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	650 kali	3,200,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	650 kali	3,200,000,000	
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	3,227,200,000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	100%	3,227,200,000	

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU pada Tahun 2025 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU.

Tabel. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Provinsi Sumatera Utara
Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tidak Ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Pemerintahan dan Otonomi SetdaprovSU merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPd (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya untuk memberikan kejelasan arah dan langkah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, sehingga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pihak swasta sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan sasaran yang akan dicapai yang menjadi fokus penetapan program,

kegiatan dan sumber daya organisasi yang menggambarkan pencapaian dan realisasi tujuan yang terukur serta adanya kepastian waktu penyelesaiannya.

Melalui tujuan tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1) Tujuan

Tujuan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2) Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target
					2021	2022	2023	2025
	Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Penetapan Batas Wilayah Antar Provinsi	Pilar	-	-	-	15
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai/Skor	-	-	-	3,6
		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas	Jumlah kerjasama yang terealisasi	Dokumen	-	-	-	30

3. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon Kinerja, Manual Indikator, *Cascading*, *Crosscutting* Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu terlampir.

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan hubungan kerja dengan pihak terkait lainnya.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan OPD terkait untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- b. Merumuskan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pendidikan, Kesehatan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, dan tenaga kerja.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti;
- b. Proposal permohonan belanja hibah yang ditindak lanjuti.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Realisasi	Target
					2023	2025
1	Meningkatnya pelayanan kebijakan dan pelayanan di Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkompeten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama	Persentase proposal hibah yang ditindaklanjuti	Persen	96%	75%
			Persentase kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	85%	75%

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta Upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran

tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam lampiran,-.

C. Biro Hukum

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja-Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini adalah Bappeda yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib, Biro Hukum Setdaprovsu melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan Umum antara lain Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kualitas Aparatur Penegak Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyusunan usulan program dan kegiatan pada Rencana APBD Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2025.

1. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Hukum Setdaprovsu Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan fasilitasi peraturan daerah, dan eksaminasi

keputusan kepala daerah serta pelayanan bantuan hukum dan penanganan permasalahan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara, guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.

2. Sasaran

Penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum Hukum SetdaprovSU Tahun 2025 mempunyai sasaran kepada terwujudnya pelayanan prima dalam hal pelaksanaan kegiatan evaluasi dan fasilitasi peraturan daerah, dan eksaminasi keputusan kepala daerah serta pelayanan bantuan hukum dan penanganan permasalahan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara, guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Utara.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Biro Hukum SetdaprovSU ini meliputi:

1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan PemprovSU dan Masyarakat.

D. Biro Perekonomian

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan

RKP 2025 menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama

Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas sehingga difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2025 tema pembangunan nasional adalah : “***Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan***”.

Terdapat 3 arah kebijakan prioritas RKP 2025 yaitu:

- a) SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
- b) Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah.
- c) Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- a) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

- b) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
- c) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
- d) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- e) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2. Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian Setdaprovsu

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan tiga tahun). Tujuan akan menentukan bagian bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas dijabarkan pada table sebagai berikut::

Tabel. 34
Tujuan dan Sasaran Renja Biro Perekonomian Setdaprovsu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi			Target
					2021	2022	2023	2025
I	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan							
	Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah							
			Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	Persen	100	100	100	100
			Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	Persen	50,00	71,43	57,14	50,00
			Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	Persen	n/a	n/a	n/a	100

3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2025 adalah:

- a. Pencapaian arah kebijakan RKP 2025.
- b. Pencapaian Sasaran Strategis pada RPD 2024-2026.
- c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu Tahun 2025 adalah 2 (dua) Program dan 8 Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sumatera Utara

Nama Perangkat Daerah : Biro Perekonomian Setda Provsu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Sumatera Utara	95%	2.009.756.215	PAD		95%	1.589.694.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Sumatera Utara	12 bulan	409.756.215	PAD		12 bulan	451.051.200
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	12 Dokumen	409.756.215	PAD		12 Dokumen	451.051.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	Sumatera Utara	10 orang	260.000.000	PAD		10 orang	71.954.700
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	6 unit	160.000.000	PAD		6 unit	62.304.700
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	10 orang	100.000.000	PAD		10 orang	9.650.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	Sumatera Utara	12 bulan	1.290.000.000	PAD		12 bulan	1.046.688.500

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	13 Paket	200.000.000	PAD		13 Paket	123.449.150
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	20 Paket	300.000.000	PAD		20 Paket	280.125.262
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	12 Paket	120.000.000	PAD		12 Paket	110.394.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	6 Dokumen	20.000.000	PAD		6 Dokumen	9.150.088
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	50 Laporan	650.000.000	PAD		50 Laporan	523.570.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Sumatera Utara	40 unit	50.000.000	PAD		40 unit	20.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	40 unit	50.000.000	PAD		40 unit	20.000.000
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Sumatera Utara	95%	3.600.000.000	PAD		95%	2.910.305.600
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan kebijakan ekonomi makro mikro yang diimplementasikan	Sumatera Utara	90%	1.750.000.000	PAD		90%	1.064.017.000
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Sumatera Utara	6 Dokumen	1.000.000.000	PAD		6 Dokumen	515.734.000
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Sumatera Utara	8 Dokumen	750.000.000	PAD		8 Dokumen	548.283.000

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Sumatera Utara	6 dokumen	950.000.000	PAD		6 dokumen	849.567.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sumatera Utara	3 dokumen	350.000.000	PAD		3 dokumen	324.122.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sumatera Utara	1 dokumen	250.000.000	PAD		1 dokumen	201.747.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sumatera Utara	2 dokumen	350.000.000	PAD		2 dokumen	323.698.000
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Sumatera Utara	8 dokumen	900.000.000	PAD		8 dokumen	996.721.600
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Sumatera Utara	5 dokumen	350.000.000	PAD		5 dokumen	398.755.600
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Sumatera Utara	1 dokumen	300.000.000	PAD		1 dokumen	298.914.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Sumatera Utara	2 dokumen	250.000.000	PAD		2 dokumen	299.052.000

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- b. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Terkoordinirnya dan terfasilitasinya OPD Pemprov dan Instansi terkait serta mitra binaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;.
- b. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sumber dana APBD maupun APBN;
- c. Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara..

3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 800.000.000,-
- b. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa terdairi dari 3 (tiga) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.200.000.000,-

2. Kegiatan Prioritas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

- a. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.542.678.080,-

- b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp.64.890.000,-
- c. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.72.600.000,-
- d. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran Rp.1.684.042.891,- terdiri dari sub kegiatan:
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.693.106.891,-
 - Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.320.900.000,-
 - Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa anggaran sebesar Rp.670.036.000,-
- e. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik anggaran sebesar Rp.1.952.946.885,- terdiri dari sub kegiatan:
 - Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik anggaran sebesar Rp.349.808.685,-
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.1,212.737.500,-
 - Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.390.400.700,-
- f. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.1.287.624.085,- terdiri dari sub kegiatan:
 - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.897.944.235,-
 - Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.256.871.880,-
 - Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp.132.807.970,-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 (terlampir).

F. Biro Administrasi Pembangunan

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
- b) Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
- c) Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
- d) Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
- e) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
- f) Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi Pembangunan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan Dan Sasaran

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1) Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Memberikan pelayanan kegiatan Pembangunan.

2) Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah.
- b. Meciptakan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah

3. Program Dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan Pembangunan Daerah , yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 4.757.503.915,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan ratus Lima Belas Rupiah)-.

2. Kegiatan

- a) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 1.675.000.000.-
- b) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang diusulkan sebesar Rp. 1.120.000.000.-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikator beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada

tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan
Setdaprovsu:

Tabel. 35
Program Dan Kegiatan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	1.962.503.915	APBD		100%	2.400.000.000
4 01 01 1 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	130.000.000	APBD		100%	150.000.000
4 01 01 1 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dok	130.000.000	APBD		15 Dok	150.000.000
4 01 01 1 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	225.000.000	APBD		100%	250.000.000
4 01 01 1 05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Kegiatan	140.000.000	APBD		5 Kegiatan	150.000.000
4 01 01 1 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sumatera Utara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	85.000.000	APBD		5 Orang	100.000.000

4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	995.000.000	APBD		100%	1.300.000.000
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Unit	120.000.000	APBD		25 Unit	150.000.000
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	115.000.000	APBD		50 Paket	150.000.000
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.000 Paket	160.000.000	APBD		10.000 Paket	200.000.000
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	600.000.000	APBD		100 Laporan	800.000.000
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	532.503.712	APBD		100%	600.000.000
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 Orang	532.503.712	APBD		10 Orang	600.000.000
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80.000.203	APBD		100%	100.000.000
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	80.000.203	APBD		25 Unit	100.000.000
4	01	08	1			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		Jumlah Kebbijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan		2.795.000.000	APBD			3.950.000.000
4	01	08	1	1		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	1.675.000.000	APBD		100%	2.300.000.000

4	01	08	1	1	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	15 Dokumen	495.000.000	APBD		15 Dokumen	700.000.000
4	01	08	1	1	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	15 Dokumen	480.000.000	APBD		15 Dokumen	750.000.000
4	01	08	1	1	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	10 Dokumen	700.000.000	APBD		10 Dokumen	850.000.000
4	01	08	1	2		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	1.120.000.000	APBD		100%	1.650.000.000
4	01	08	1	2	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Analisis capaian Kinerja	2 Laporan	500.000.000	APBD		2 Laporan	700.000.000
4	01	08	1	2	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Non Fisik	15 Laporan	370.000.000	APBD		15 Laporan	500.000.000
4	01	08	1	2	03	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan perumusan teknis pembangunan	5 Laporan	250.000.000	APBD		5 Laporan	450.000.000

G. Biro Organisasi

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan pembangunan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik dan proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan bahwa usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD.

2. Tujuan dan sasaran Biro Organisasi Setdaprovsu.

Adapun tujuan Biro Organisasi Setdaprovsu adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih.

Untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" Biro Organisasi menetapkan 3 sasaran yaitu:

- a. Terwujudnya Kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- c. Penerapan SAKIP yang berbasis Kinerja secara optimal pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3. Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu.

Biro Organisasi Setdaprovsu menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas dan budaya kerja provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Rencana Kerja Tahun 2023 Biro Organisasi Setdaprovsu memiliki 2 (dua) program 9 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,- yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 10 Sub kegiatan;
2. Program Penataan Organisasi dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

H. Biro Umum

1. Telaahan dan Sasaran Perangkat Daerah

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional Rencana Kerja yang disusun Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan

kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terlar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Umum Setdaprovsu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan
7. Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu komponen Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Biro Umum Setdaprovsu di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengukuhan juga dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sumut.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dirai dari masing-masing misi.

Untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kepentingan mewujudkan Visi dan Misi, serta mengacu kepada faktor - faktor kunci keberhasilan maka Misi yang telah ditetapkan dianalisis keterkaitannya dengan faktor - faktor kunci keberhasilan.

Tujuan Biro Umum SetdaprovSU adalah :

- 1) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Ketatausahaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan layanan konsultasi/tamu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Meningkatnya Fasilitas Penataan dan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

b. Sasaran

Mengacu kepada tujuan yang ditetapkan maka sasaran dalam rangka pencapaian tujuan itu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Yang Berorientasi Pada Pelayanan Prima. Dengan indikatornya adalah Persentase Layanan Administrasi Umum
2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah adalah Persentase Fasilitas Kedinasan Pimpinan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess PemprovSU adalah Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess PemprovSU.

3. Program dan Kegiatan

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta

menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Umum Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu,

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 9 (Kegiatan) 27 (Sub Kegiatan) dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 328.532.703.009
- 2) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang terdiri dari 1 (Kegiatan) 1 (Sub Kegiatan) dengan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 13.324.480.000,00

b. Kegiatan Prioritas Biro Administrasi Pimpinan

- 1) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp 106.622.959.545
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.290.245.886
- 3) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 13.324.480.000,00

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Umum Setdaprovsu.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Umum Setdaprovsu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

KODE PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			SUMBER DANA	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-	328.532.703.009,00		-	-	361.391.956.112,00
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	79.686.481.924,00		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	87.655.130.117,00
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				79.171.452.444,00				87.088.597.689,00
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				515.029.480,00				566.532.428,00
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	1.481.200.000,00		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.629.320.000,00
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.481.200.000,00				1.629.320.000,00
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	60.125.000,00		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	72.150.000,00
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60.125.000,00				72.150.000,00
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	106.622.959.545,00		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	117.285.255.500,00
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.225.360.670,00				17.847.896.737,00

4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.375.730.665,00				7.013.303.732,00
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.697.549.460,00				1.867.304.406,00
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.100.867.750,00				5.610.954.525,00
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				69.664.778.000,00				76.631.255.800,00
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.558.673.000,00				8.314.540.300,00
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	10.700.000.000,00		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	11.770.000.000,00
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9.000.000.000,00				9.900.000.000,00
4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.700.000.000,00				1.700.000.000,00
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	46.028.568.634,00		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.870.000.000,0
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				176.741.900,00				194.386.390,00
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				9.914.700.800,00				10.906.170.880,00
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				554.400.000,00				609.840.000,00
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.382.725.934,00				38.920.998.527,00
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	56.600.598.702,00		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	62.260.658.573,00
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya				4.676.291.860,00				5.143.921.046,00

	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11.432.993.415,00				12.576.292.757,00
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2.995.319.000,00				3.294.850.900,00
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	14.463.376.000,00		Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	15.909.713.600,00
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				13.713.376.000,00				15.084.713.600,00
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				500.000.000,00				550.000.000,00
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				250.000.000,00				275.000.000,00
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Dalam dan Luar Daerah	100%	12.889.393.204,00		Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	14.178.332.525,00
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				5.290.245.886,00				5.819.270.475,00
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				3.875.256.872,00				4.262.782.559,00
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				3.723.890.446,00				4.096.279.491,00
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN	-	-	-	13.324.480.000,00		-	-	14.656.928.000,00

	PENGADAAN BARANG DAN JASA								
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dalam dan Luar Daerah	100%	13.324.480.000,00		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	14.656.928.000,00
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				13.324.480.000,00				14.656.928.000,00
	JUMLAH				341.857.183.009,00		JUMLAH		376.048.884.112,00

I. Biro Administrasi Pimpinan

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Prioritas Nasional

Rencana Kerja yang disusun Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dan berkaitan dengan kebijakan nasional dan prioritas nasional sehingga terjadi kesinambungan antara pusat dan daerah.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal) yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Menciptakan iklim kerja yang baik, koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
4. Meningkatkan jaringan data dan informasi dengan seluruh pihak terkait
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media masa serta media kemasyarakatan lainnya untuk mempercepat arus informasi dalam mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan.
6. Mengembangkan suatu mekanisme dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan terutama yang terkait dengan aktivitas kerja resmi pimpinan Lembaga Pemerintahan sehingga tercipta proses kerja yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

a. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- c. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
- d. Menyediakan dan menyajikan bahan materi dan paparan pimpinan.
- e. Membina hubungan yang harmonis dengan Lembaga/instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kedinasan Pimpinan dan tamu.
- g. Meningkatnya sumber daya aparatur yang professional kompeten dan akuntabel.

b. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
 - c. Terkoordinasinya Perencanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA dan DPA Sekretariat Daerah
 - d. Tersusunnya Pelaporan LPPD, LKPJ, LK, PK, IKU dan IKK Sekretariat Daerah.
 - e. Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah.
- 2. Menyediakan dan menyajikan bahan materi dan paparan Pimpinan.
 - f. Tersedianya Bahan Materi dan Paparan Pimpinan
 - g. Terfasilitasi Penyajian Bahan Materi dan Paparan Pimpinan
 - h. Terdokumentasinya Kegiatan Pimpinan
- 3. Membina hubungan yang harmonis dengan Lembaga/instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
 - i. Terbangunnya hubungan yang harmonis dengan Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - j. Terbangunnya hubungan yang harmonis dengan Masyarakat dan Swasta
- 4. Meningkatkan pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu.
 - k. Terfasilitasi Pelayanan Kedinasan Pimpinan dalam tata upacara, tata tempat dan tata pelaksanaan kegiatan.

- l. Terfasilitasi kebutuhan tamu Pimpinan.
5. Meningkatnya sumber daya aparatur yang professional kompeten dan akuntable.
 - m. Terpenuhinya Kompetensi sumber daya aparatur dalam menunjang Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi.
 - n. Tercapainya Jenjang Pendidikan dan pelatihan Strukturan dan Fungsional bagi sumber daya aparatur

4. Program dan Kegiatan

a. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah serta menjalin kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk mencapai visi dan misi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 17.000.000.000.-.

b. Kegiatan Prioritas Biro Administrasi Pimpinan

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 2.223.125.000.-
2. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 2.089.062.000.-
3. Fasilitasi Keprotokolan dengan pagu anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 6.176.044.800.-

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu.

Tabel. 36

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				17,000,000,000	APBD			18,700,000,000
4 01 01 1 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sumatera Utara		49,000,000	APBD			53,900,000
4 01 01 1 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	60 Eks. Dok	28,000,000	APBD		60 Eks. Dok	30,800,000
4 01 01 1 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Utara	100 Eks. Dok	21,000,000	APBD		100 Eks. Dok	23,100,000

4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sumatera Utara		2,357,760,000	APBD			2,593,536,000
4	01	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	1 Tahun	2,357,760,000	APBD		1 Tahun	2,593,536,000
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Sumatera Utara		1,084,904,055	APBD			1,193,394,461
4	01	01	1	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	100%	903,704,055	APBD		100%	994,074,461
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	16 Orang	181,200,000	APBD		16 Orang	199,320,000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sumatera Utara		4,845,474,345	APBD			5,330,021,780
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	150 Unit	114,773,712	APBD		150 Unit	126,251,083
4	01	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	150 Jenis	795,341,190	APBD		150 Jenis	874,875,309
4	01	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	9 Jenis	163,212,800	APBD		9 Jenis	179,534,080

4	01	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	51 Jenis	400,000,000	APBD		51 Jenis	440,000,000
4	01	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Utara	1000 kali	2,223,125,000	APBD		1000 kali	2,445,437,500
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	245 Kali	1,149,021,643	APBD		245 Kali	1,263,923,807
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sumatera Utara		13,000,000	APBD			14,300,000
4	01	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	260 Kali	13,000,000	APBD		260 Kali	14,300,000
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sumatera Utara		384,754,800	APBD			423,230,280
4	01	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	10 Unit	384,754,800	APBD		10 Unit	423,230,280
4	01	01	1	13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Sumatera Utara		2,089,062,000	APBD			2,297,968,200
4	01	01	1	13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Persentase Materi Pimpinan yang Disiapkan	Sumatera Utara	100%	441,712,000	APBD		100%	485,883,200
4	01	01	1	13	02	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	Persentase Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Sumatera Utara	100%	1,025,000,000	APBD		100%	1,127,500,000

4	01	01	1	13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Persentase Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sumatera Utara	100%	622,350,000	APBD		100%	684,585,000
4	01	01	1	14		Fasilitasi Keprotokolan		Sumatera Utara		6,176,044,800	APBD			6,793,649,280
4	01	01	1	14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sumatera Utara	100%	1,048,644,800	APBD		100%	1,153,509,280
4	01	01	1	14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sumatera Utara	650 Kali	2,900,000,000	APBD		650 Kali	3,190,000,000
4	01	01	1	14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Persentase Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sumatera Utara	100%	2,227,400,000	APBD		100%	2,450,140,000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Penyusunan rancangan akhir Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu Tahun 2025 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan akhir Renja Tahun 2025 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel. 37
Program dan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Pagu	Catatan Pembahasan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,117,236,034	
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	20,300,000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	20,300,000	
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	100%	1,071,936,034	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	54,700,000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	200,000,000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100,000,000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	717,236,034	

III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	100%	965,000,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	950,000,000	
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	60,000,000	
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	60,000,000	
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	3,900,000,000	
I	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	1,400,000,000	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	600,000,000	
2	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	800,000,000	
II	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	1,800,000,000	
1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1 Dokumen	850,000,000	
2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	350,000,000	
3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Laporan	600,000,000	
III	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	100%	700,000,000	

1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	300,000,000	
2	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	200,000,000	
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	200,000,000	

Kegiatan indikatif penjabaran program kerja tersebut yang menggambarkan Indikator Kinerja dan kelompok Sasaran, dana Indikatif beserta sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut secara terperinci direferensikan pada tabel T-C.33 Rencana Kerja (Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu.

Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU Tahun 2025 dan Prakiraan Maju
Tahun 2026**

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Porgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sumatera Utara	100%	2,117,236,034	APBD		100%	2,081,298,872
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur	Sumatera Utara	100%	20,300,000	APBD		100%	23,320,000
4	01	01	1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	40 orang	20,300,000	APBD		40 orang	23,320,000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum	Sumatera Utara	100%	1,071,936,034	APBD		100%	946,345,100

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	01	1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	4 Paket	54,700,000	APBD		4 Paket	49,500,000
4	01	01	1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	3 Paket	200,000,000	APBD		3 Paket	228,812,218
4	01	01	1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Paket	100,000,000	APBD		1 Paket	61,022,610
4	01	01	1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	1 Laporan	717,236,034	APBD		1 Laporan	607,010,272
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa surat menyurat dan jasa pelayanan umum kantor	Sumatera Utara	100%	965,000,000	APBD		100%	956,133,772
4	01	01	1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	1 Laporan	15,000,000	APBD		1 Laporan	7,480,000
4	01	01	1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	1 Laporan	950,000,000	APBD		1 Laporan	948,653,772

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Sumatera Utara	100%	60,000,000	APBD		100%	139,000,000
4	01	01	1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	35 Unit	60,000,000	APBD		35 Unit	139,000,000
4	01	03				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Terlaksananya Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sumatera Utara	100%	3,900,000,000	APBD		100%	7,332,880,000
4	01	03	1	01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Sumatera Utara	100%	1,400,000,000	APBD		100%	2,072,400,000
4	01	03	1	01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Sumatera Utara	1 Dokumen	600,000,000	APBD		1 Dokumen	972,400,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	03	1	01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Sumatera Utara	1 Dokumen	800,000,000	APBD		1 Dokumen	1,100,000,000
4	01	03	1	02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sumatera Utara	100%	1,800,000,000	APBD		100%	3,358,800,000
4	01	03	1	02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Sumatera Utara	1 Dokumen	850,000,000	APBD		1 Dokumen	1,700,000,000
4	01	03	1	02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Sumatera Utara	1 Dokumen	350,000,000	APBD		1 Dokumen	629,200,000
4	01	03	1	02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sumatera Utara	1 Laporan	600,000,000	APBD		1 Laporan	1,029,600,000

kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4	01	03	1	03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Koordinasi dan Kerjasama antar Pemerintahan dan Pihak Ketiga	Sumatera Utara	100%	700,000,000	APBD		100%	1,091,680,000
4	01	03	1	03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	300,000,000	APBD		1 Dokumen	699,600,000
4	01	03	1	03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Sumatera Utara	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	549,120,000
4	01	03	1	03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Sumatera Utara	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	652,960,000

B. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Rencana Kerja

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan rancangan RKPD.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu tahun 2025 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023-2026.

2. Pendanaan Perangkat Daerah

Rancangan awal Renja Tahun Anggaran 2025 Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi, sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Rp. 5.512.330.714, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp. 2.498.933.818, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a) Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rp. 907.832.884;
 - b) Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan, Rp. 206.020.934;
 - c) Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Rp.1.385.080.000.
 2. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp. 3.013.396.896,- terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Rp. 22.006.096;
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rp. 259.181.800;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Rp. 2.732.209.000.
- B. Program Kesejahteraan Rakyat, Rp. 403.254.944.227, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, Rp. 171.845.976.450, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, Rp. 151.951.334.728;

- b) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, Rp. 19.894.641.722.
- 2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Rp. 225.743.010.051, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Rp. 202.524.029.200;
 - b) Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, Rp.973.981.001;
 - c) Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, Rp.22.244.999.850.
- 3. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Rp. 5.665.957.726, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata, Rp. 723.521.726;
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Rp. 4.942.436.000.

C. Biro Hukum

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum SetdaprovSU yang direncanakan untuk periode Tahun 2025 (yang secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel terlampir) meliputi:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pagu sebesar Rp. 2.079.111.813, terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 130.530.000

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Rp. 130.530.000

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 621.924.000

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Rp. 550.840.000
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Rp. 71.084.000

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 1.002.779.413

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Rp. 228.087.063
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Rp. 22.206.350
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Rp. 752.486.000

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 308.878.400

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Rp. 3.550.000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Rp. 115.950.800
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Rp. 189.377.600

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 15.000.000

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Rp. 15.000.000

II. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, pagu sebesar Rp. 3.920.888.187, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan, dengan pagu sebesar Rp. 1.718.117.187

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, Rp. 617.094.086
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, Rp. 35.000.000
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, Rp. 504.513.101

- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, Rp. 561.510.000

2. Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan pagu sebesar Rp. 2.202.771.000

- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, Rp. 702.681.000
- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, Rp. 1.500.090.000

Jumlah Total Rp. 6.000.000.000.

D. Biro Perekonomian

Penyusunan Renja 2025 berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Perekonomian SetdaprovSU Tahun 2025 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Renja Tahun 2025 Biro Perekonomian SetdaprovSU mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel TC-33 berikut ini:

Tabel. 39

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Biro Perekonomian Setda Provsu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Sumatera Utara	95%	2.009.756.215	PAD		95%	1.589.694.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Sumatera Utara	12 bulan	409.756.215	PAD		12 bulan	451.051.200
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Utara	12 Dokumen	409.756.215	PAD		12 Dokumen	451.051.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan ASN Biro Perekonomian	Sumatera Utara	10 orang	260.000.000	PAD		10 orang	71.954.700
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sumatera Utara	6 unit	160.000.000	PAD		6 unit	62.304.700
	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Utara	10 orang	100.000.000	PAD		10 orang	9.650.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Biro Perekonomian	Sumatera Utara	12 bulan	1.290.000.000	PAD		12 bulan	1.046.688.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	13 Paket	200.000.000	PAD		13 Paket	123.449.150
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Utara	20 Paket	300.000.000	PAD		20 Paket	280.125.262
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Utara	12 Paket	120.000.000	PAD		12 Paket	110.394.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumatera Utara	6 Dokumen	20.000.000	PAD		6 Dokumen	9.150.088
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Utara	50 Laporan	650.000.000	PAD		50 Laporan	523.570.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Sumatera Utara	40 unit	50.000.000	PAD		40 unit	20.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Utara	40 unit	50.000.000	PAD		40 unit	20.000.000
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	Sumatera Utara	95%	3.600.000.000	PAD		95%	2.910.305.600
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Pengelolaan kebijakan ekonomi makro	Sumatera Utara	90%	1.750.000.000	PAD		90%	1.064.017.000

		mikro yang diimplementasikan							
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Sumatera Utara	6 Dokumen	1.000.000.000	PAD		6 Dokumen	515.734.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Sumatera Utara	8 Dokumen	750.000.000	PAD		8 Dokumen	548.283.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Sumatera Utara	6 dokumen	950.000.000	PAD		6 dokumen	849.567.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sumatera Utara	3 dokumen	350.000.000	PAD		3 dokumen	324.122.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sumatera Utara	1 dokumen	250.000.000	PAD		1 dokumen	201.747.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sumatera Utara	2 dokumen	350.000.000	PAD		2 dokumen	323.698.000
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Dokumen pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Sumatera Utara	8 dokumen	900.000.000	PAD		8 dokumen	996.721.600

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Sumatera Utara	5 dokumen	350.000.000	PAD		5 dokumen	398.755.600
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Sumatera Utara	1 dokumen	300.000.0000	PAD		1 dokumen	298.914.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Sumatera Utara	2 dokumen	250.000.000	PAD		2 dokumen	299.052.000

E. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2025 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	604.781.941
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.678.080
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.050.080
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.288.000
c	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.700.000
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.640.000
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600.000
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.600.000
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.890.000
a	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.890.000
II.	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	4.924.613.861
1	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.684.042.891
a	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	693.106.891
b	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	320.900.000
c	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	670.036.000
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.952.946.885

a	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	349.808.685
b	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.212.737.500
c	Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	390.400.700
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.287.624.085
a	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	897.944.235
b	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	256.871.880
c	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	132.807.970

F. Biro Administrasi Pembangunan

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2026 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun 2025 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2026. Rancangan awal Renja Tahun 2025 Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.962.503.915
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	140.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	995.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	160.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.503.712
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	532.503.712
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.203

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.203
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.795.000.000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.675.000.000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	495.000.000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	480.000.000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	700.000.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.120.000.000
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	500.000.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	370.000.000
	Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	250.000.000

G. Biro Organisasi

Penyusunan Rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Awal Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Rancangan Awal Renja Tahun 2023 Biro Organisasi Setdaprovsu mengusulkan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel. 40
Program/Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu

No	Program/Kegiatan
1	2
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

	08	Fasilitas Kunjungan Tamu
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
	1	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	01	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi
	02	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab/Kota
	03	Penataan Analisis Jabatan
	2	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
	05	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 37

Tabel. 41
Rencana Kerja Dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SEKRETARIAT DAERAH			5,000,000,000
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			1,783,517,000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,700,000

	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	6 dokumen	20,700,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					499,220,800
	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dan Non ASN pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN	9 Orang	378,500,800
	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN pengelola administrasi pelaksanaan tugas ASN	7 Orang	120,720,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					137,500,000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat	5 Orang	137,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah					982,031,200.00
	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	725 buah	70,509,400
	02	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	223.496 lbr	126,337,800
	03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	200 org	35,184,000
	04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat kordinasi dan kunsultasi yang diikuti	15 kali	750,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	121,000,000.00
	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	4 unit	121,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					3,065,000.00
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan materi yang dibeli	323 dokumen	3,065,000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				20,000,000.00
	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di servise	20 unit	20,000,000
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase penataan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses	100%	3,216,483,000.00
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Persentase Penataan Kelembagaan dan Anjab ABK	100 persen	1,072,161,000.00
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Penataan Kelembagaan Provinsi	100 persen	357,387,000
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	100 persen	357,387,000
	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Anjab dan ABK yang tersusun	100 persen	357,387,000
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	100 persen	2,144,322,000.00
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pembinaan pelaksanaan RB	100 persen	547,161,000
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pelaksanaan Monev Akuntabilitas Kinerja	100 persen	350,000,000
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Pelaksanaan Budaya Kerja	100 persen	175,000,000
	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah kebijakan di bidang Ketatalaksanaan yang dikelola	6 Dokumen	413,921,000
	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam peningkatan	41 PD Provsu dan 33 Kab/kota	658,240,000

			pelayanan publik yang berkualitas		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

H. Biro Umum

1. Program Biro Umum Setdaprovsu

Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi pejabaran visi misi yang telah ditetapkan serta mampu mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- a. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governnace), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efesien ketatalaksanaan dan prosedur kerja pada tingkatan struktur organisasi kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima mudah, dan murah.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 79.686.481.924,00
- b. Administrasi Barang Milik Daerah Rp. 1.481.200.000,00
pada Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 60.125.000,00
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 106.622.959.545,00
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Rp. 10.700.000.000,00
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Rp. 46.028.568.634,00
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Rp. 56.600.598.702,00
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Rp. 14.463.376.000,00
- i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Rp. 12.889.393.204,00

2) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 13.324.480.000,00,-

Dari uraian diatas, diketahui bahwa APBD yang meliputi pelaksanaan belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp. 341.857.183.009,00,-** (*Tiga Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Rupiah*) Sedangkan belanja langsung berupa gaji dan TPP Sekretariat Daerah Provsu, Biro Umum Setdaprovsu hanya mengusulkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk ditampung dalam APBD dan selanjutnya dimasukkan dalam Renja, RKA, dan DPA.

I. Biro Administrasi Pimpinan

Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan Rancangan RKPD.

Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu Tahun 2023 mengajukan program dan kegiatan berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Rancangan awal Renja Tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mengusulkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

Tabel. 42
Program/Kegiatan dan Anggaran Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.000.000.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.357.760.000

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.357.760.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.084.904.055
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	903.704.055
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	181.200.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.845.474.345
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.773.712
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	795.341.190
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	163.212.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	400.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.223.125.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.149.021.643
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	384.754.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	384.754.800
7	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.089.062.000
	Penyiapan Materi Pimpinan	441.712.000
	Fasilitasi Komunikasi pimpinan	1.025.000.000
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	622.350.000
8	Fasilitasi Keprotokolan	6.176.044.800
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.048.644.800
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.900.000.000
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.227.400.000

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan acuan untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, sehingga efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara terus dioptimalkan agar berjalan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disusun setiap tahun anggaran untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek pada Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Kerja ini akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur Pimpinan dan staf yang disertai pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Renja bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan good governance dan clean government.

Akhirnya rumusan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

SEKRETARIS DAERAH

ARIEF S. TRINUGROHO